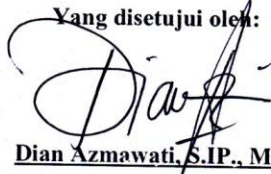


LEMBAR PENGESAHAN PUBLIKASI
LATAR BELAKANG JEPANG MENJALIN KERJASAMA KEAMANAN DENGAN
FILIPINA TAHUN 2013
STUDI KASUS: SENGKETA LAUT CHINA SELATAN

THE BACKGROUND OF JAPAN'S ESTABLISHES SECURITY COOPERATION
WITH PHILIPINES 2013
CASE STUDY: DISPUTE SOUTH CHINA SEA

Yang disetujui oleh:



Dian Azmawati, S.IP., M.A

Dosen Pembimbing

LEMBAR PENGESAHAN PUBLIKASI

**LATAR BELAKANG JEPANG MENJALIN KERJASAMA KEAMANAN DENGAN
FILIPINA TAHUN 2013
STUDI KASUS: SENGKETA LAUT CHINA SELATAN**

**THE BACKGROUND OF JAPAN'S ESTABLISHES SECURITY COOPERATION
WITH PHILIPPINES 2013
CASE STUDY: DISPUTE SOUTH CHINA SEA**

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Dian Azmawati, S.IP., M.A

**LATAR BELAKANG JEPANG MENJALIN KERJASAMA KEAMANAN DENGAN
FILIPINA TAHUN 2013
STUDI KASUS: SENGKETA LAUT CHINA SELATAN
THE BACKGROUND OF JAPAN'S ESTABLISHES SECURITY COOPERATION
WITH PHILIPPINES 2013
CASE STUDY: DISPUTE SOUTH CHINA SEA**

Mutiara Fitri Nurrahmah

20130510332

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: mutiaranurrahmah@gmail.com

Abstract

The bilateral relations between Japan and Philippines has been established since long before the World War II. Recently, Japan strengthens the relations by extending the cooperation in the economic field to the military. Japan inaugurated the security cooperation in 2013 under the Prime Minister Shinzo Abe's government. The two countries agreed to form a security cooperation agreement which addressed as a response in facing the enhancement of China's military capability in each region of Asia Pacific. This research will then analyze more about the security cooperation between Japan and Philippines in response to the enhancement of China's military capability in the region.

Key word: Japan, Philippines, China, Security Cooperation, Military Power Enhancement

Abstrak

Kerjasama antara Jepang dan Filipina telah terjalin sejak sebelum masa Perang Dunia II. Dewasa ini Negara memperkuat hubungan bilateral dengan memperluas hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi hingga militer. Jepang meresmikan kerjasama keamanan di tahun 2013 dibawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Kedua Negara sepakat membentuk perjanjian kerjasama keamanan ditujukan sebagai bentuk respon dalam menghadapi peningkatan kapabilitas militer Tiongkok di masing-masing wilayah Asia Pasifik. Penelitian ini kemudian akan menganalisa lebih lanjut mengenai hubungan kerjasama keamanan Jepang dan Filipina dalam merespon peningkatan kekuatan militer Tiongkok diwilayah kawasan.

Kata kunci: Jepang, Filipina, Tiongkok, kerjasama keamanan, peningkatan kekuatan militer

A. PENDAHULUAN

Hubungan kerjasama Jepang dan Filipina telah terjalin sejak sebelum masa Perang Dunia I. Jepang adalah negara yang memiliki pertahanan dan keamanan yang sangat kuat pada masa Perang Dunia II. Jepang berkeinginan untuk membentuk sebuah Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Meskipun Jepang bukanlah aktor utama dalam Perang dunia II, namun agresifitas militer Jepang menarik perhatian pihak sekutu dalam upayanya melakukan ekspansi wilayah di kawasan Asia Pasifik. Jepang berhasil menduduki Filipina, namun Jepang terus mengalami perlawanan dari rakyat Filipina dan pasukan Sekutu.

Serangan perlawanan terus ditujukan kepada Jepang, Jepang mulai menarik pasukan dari pendudukannya di Filipina. Puncak kekalahan Jepang yaitu ketika Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh tentara militer Amerika Serikat sebagai upaya pembalasan terhadap penyerangan yang dilakukan oleh Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat, Pearl Harbour di kepulauan Hawaii. Kehancuran yang dialami Jepang membuat Jepang tidak memiliki pilihan lain selain menyerah kepada pihak sekutu.

Kekalahan Jepang tersebut menjadi pintu gerbang awal masuknya kontrol Amerika Serikat terhadap Jepang. Dengan memerintahkan *Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP)* yakni tentara sekutu Amerika Serikat untuk menduduki Jepang segera setelah dua minggu pasca Perang Dunia II berakhir. Pengaruh kuat dari kontrol Amerika Serikat melalui SCAP salah satunya adalah dalam pembuatan Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang.

Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang tersebut menandai pasifisme dalam militer Jepang, dimana sebelumnya militer Jepang yang aktif terkenal *offensive* dan agresif seperti pada saat ekspansi wilayah melalui imperialisme Jepang di kawasan Asia Pasifik. Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang ini yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan di Jepang dan segala macam tindakan militer Jepang akan diawasi oleh SCAP. Jepang tidak lagi dapat menggunakan kekuatan militer untuk penjagaan negaranya. SCAP memberikan perintah kepada Jepang untuk membuat pasukan keamanan sendiri yakni *National Police Reserve (NPR)* atau Pasukan Keamanan Nasional yang kemudian berganti nama menjadi *Self Defense Forces (SDF)* atau Pasukan Bela Diri.

Pada tahun 1951 Jepang membuat dua perjanjian sebagai komitmen untuk damai dan tidak saling menyerang. Dua perjanjian tersebut adalah *San Fransisco Treaty* yang berupa perjanjian damai, serta *Japan-US Security Treaty*. Dalam *Japan-US Security Treaty*, Amerika Serikat diperbolehkan menempatkan pangkalan militernya lengkap dengan pasukan dan persenjataan di wilayah Okinawa, Jepang, serta keamanan eksternal Jepang ditanggung oleh militer Amerika Serikat.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat memiliki hak untuk mempertahankan kekuatan darat, laut dan udaranya di Jepang. Kekuatan ini dapat dipergunakan: (1) untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di Timur Jauh tanpa konsultasi terlebih dahulu; (2) setelah berkonsultasi, Amerika

Serikat dapat melakukan tindakan untuk mempertahankan Jepang dari serangan pihak luar. Perjanjian tersebut merinci bahwa operasi yang dijalankan dari basis Jepang oleh pihak lain “harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Jepang”.

Shinzo Abe terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Jepang tahun 2012. Pada tahun berikutnya, Jepang dan Amerika Serikat melakukan proses revisi terhadap *Japan-US Defense Guidelines* yang dijadikan sebagai panduan dalam hubungan kerjasama militer antara kedua negara tersebut, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak menjadi panduan terbaru pada tahun 2015.(BBC Indonesia, 2015) Proses revisi tersebut dilakukan dalam Konsultasi 2+2 Menteri Luar Negeri dan menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Jepang di Newyork, dengan melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ashton Carter, Menteri Luar Negeri Jepang Kishida Fumio dan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani. Kedua negara mempublikasikan revisi tersebut yang mengizinkan kekuatan bersenjata Jepang berperan lebih ofensif di kancah global serta bantuan dari SDF Jepang diperluas jangkauannya tidak hanya terbatas di dalam kawasan sekitar Jepang saja.(CRI Online, 2015)

B. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya memahami permasalahan yang terjadi dalam fenomena hubungan internasional tersebut, proses mengidentifikasi pokok permasalahan yang ada menggunakan teori dan konsep. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Teori dipakai untuk eksplanasi dan prediksi, sedangkan konsep untuk mengorganisasikan dan mengidentifikasikan fenomena. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan.(Mas'ood, 1990, p. 185)

Teori Geopolitik

Geopolitics berasal dari bahasa Yunani, *geo* adalah bumi sedangkan *politics* berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut pemerintahan atau kekuasaan. Pendekatan geopolitik sangat tepat untuk menganalisis mengapa perselisihan teritorial mempengaruhi suatu negara dalam berperilaku secara politik dan militer di suatu kawasan. Istilah geopolitik merefleksikan hubungan antara *power* dan kepentingan dalam pengambilan keputusan secara strategis dan wilayah geografis tertentu. (Supriyanto, 2004)

Menurut *Webster dictionary*, Geopolitik memiliki arti:

Geopolitics a study of the influence of such factors as geography, economics, and demography on the politics and especially the foreign policy of a state. Geopolitics is a combination of political and geographic factors characterizing a particular state or region. (Geopolitics Dictionary)

Geopolitik menyoroti berbagai unsur kebumiharian yang dapat mempengaruhi haluan dan strategi sebuah bangsa dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara tetangga di sekelilingnya. Unsur kebumiharian seperti, kebutuhan akan wilayah yang lebih luas agar dapat menampung pertumbuhan penduduk, keinginan dalam menguasai sumber daya alam tertentu untuk memperbesar kekuatan perekonomian negara, keperluan memiliki wilayah-wilayah pelabuhan dan jalur-jalur pelayaran serta pengendalian tempat-tempat penting untuk dapat meraih keunggulan militer. (Supriyanto, 2004)

Menurut Friederich Ratzel, Negara dipandang sebagai suatu organisme yang hidup yang menempati ruang dan tumbuh, berkembang, menyusut dan akhirnya mati. Ratzel mengatakan bahwa sebuah negara sama halnya seperti organisme. Organisme membutuhkan ruang untuk hidup, begitu pula sebuah negara. Sebuah negara membutuhkan ruang yang cukup untuk tumbuh dengan maksimal. Jika dikaitkan pada konsepsi ruang, luas tanah suatu negara akan menunjukkan posisi kekuatannya sehingga, negara akan cenderung untuk memperluas batas-batas wilayahnya dengan mengadakan ekspansi. (Dougherty & Pfaltzgraff Jr, Teori-Teori Hubungan Internasional Sebuah Survey Komprehensif, 2014) Karena geopolitik berakar pada hubungan antara kekuatan dan kekuasaan serta teritori atau wilayah. Alfred Mahan menambahkan bahwa kunci utama kekuatan negara yaitu memiliki angkatan laut. Negara yang mempunyai kontrol atas lautan lepas maka dapat mendominasi hubungan internasional dan hal tersebut dapat ditentukan oleh kekuatan angkatan laut, garis pantai dan fasilitas pelabuhan yang memadai. (Ashari, 2015)

Hal ini senada dengan melihat geopolitik Jepang untuk menjalin kerjasama dengan Filipina terkait konflik Laut China Selatan sebagai hal yang dapat dimanfaatkan untuk dapat membendung agresifitas Tiongkok dan akan memberikan keuntungan bagi Jepang bilamana terjalin kesepakatan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan dengan Filipina. Sehingga Jepang dapat lebih meningkatkan kekuatan militer serta menjaga pertahanan negaranya.

Indikasi meningkatnya kekuatan militer China dan agresifitasnya di kawasan Asia Timur menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan kawasan tersebut bagi pertahanan dan keamanan Jepang – termasuk Amerika, yang mana pangkalan militer milik Amerika Serikat berada di kawasan tersebut. Anggaran militer China meningkat tiap tahunnya dan tercatat menempati urutan terbesar kedua setelah Amerika Serikat pada tahun 2014 sebesar \$131,57 milyar. (Jakarta Greater, 2014) China semakin agresif dalam upaya klaim wilayah di perairan Laut China Timur dan Laut China Selatan. Sengketanya kian memanas diketahui bahwa sejak tahun 2013 China mempublikasikan perluasan *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* yang tumpang tindih dengan ADIZ milik Jepang di Laut China Timur – mencakup kepulauan Senkaku yang selama

ini menjadi sengketa.(Rinehart & Elias, 2015) Pada tahun 2014 militer China melakukan upaya perluasan “Fiery Cross Reef” di tepi barat kepulauan Spratly dan melakukan pembangunan pangkalan udara sepanjang tiga kilometre yang diperkirakan dapat menampung pesawat pembom jarak jauh tipe H-6 milik militer China.(Deutsche Welle, 2015)

1. Geostrategis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, sedangkan strategi diartikan sebagai suatu usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun alamnya untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kaitan dalam kehidupan suatu negara adalah sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. (Suradinata, 2005)

Geostrategi merupakan suatu cabang geopolitik yang berhubungan dengan strategi. Geostrategi memiliki sebuah kombinasi faktor geopolitik dan strategis yang memberikan ciri terhadap wilayah geografis tertentu dan digunakan sebagai strategi pemerintah yang didasarkan pada geopolitiknya. Dalam hal ini, kerjasama keamanan yang dijalin Jepang dengan Filipina dilakukan secara strategis dengan melihat nilai-nilai yang dimiliki Filipina. Posisi Filipina di kawasan Laut China Selatan inilah yang menjadi alasan utama Jepang menjalin kerjasama keamanan. Diketahui bahwa Filipina yang terlibat langsung dengan sengketa Laut China Selatan berhadapan dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Filipina mulai menyoroti pulau-pulau Spratly dan mengajukan tuntutan kepemilikan ke PBB pada tahun 1946. Filipina beranggapan bahwa pulau - pulau di Laut China Selatan diserahkan Jepang kepada Filipina pasca pendudukan Jepang di Filipina. (Suradinata, 2005) Sengketa teritorial di kawasan Laut China Selatan tidak hanya terbatas oleh masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tetapi bercampur dengan hak berdaulat atas landasan kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina pada tahun 2013 sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional. Jepang memanfaatkan nilai geostrategis Filipina untuk membendung agresifitas militer Tiongkok di kawasan Laut China Selatan. Meningkatnya eksistensi Tiongkok pada perekonomian dunia menambah deretan kekhawatiran pemerintahan Jepang. Pemerintah Jepang pada tahun 2014 memperbaharui dan menerbitkan buku putih pertahanan Jepang yang di dalamnya memuat sejumlah persoalan yang berada di sekitar Jepang, seperti isu kedaulatan wilayah dan reunifikasi, serta peningkatan potensi-potensi masalah lainnya yang berkaitan dengan wilayah, kedaulatan, ataupun kepentingan ekonomi maritim. Buku Putih Jepang menjelaskan mengenai agresifitas militer Tiongkok sebagai sumber ancaman.

Jepang merasa terancam dengan keberadaan militer Tiongkok yang terus berpatroli di daerah sekitar kawasan Laut China Selatan yang berdekatan dengan Laut China Timur, yang dianggap akan mengganggu ketenangan Jepang usai gugatan mahkamah agung memenangkan Jepang atas Laut China Timur. Disisi lain jalur perdagangan Jepang melewati perairan Laut China Selatan untuk dapat sampai di Jepang. Kerjasama keamanan yang dijalin Jepang dengan

Filipina ditujukan untuk mencapai kepentingan Jepang membendung agresifitas militer Tiongkok di kawasan Laut China Selatan melalui Filipina.

C. PEMBAHASAN

Bahwa keputusan Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina tahun 2013, dengan mempertimbangkan perubahan dinamika politik internasional yang berkembang pada saat itu. Perubahan iklim lingkungan keamanan yang terjadi di kawasan Asia pasifik sangatlah mempengaruhi keputusan Jepang tersebut. Sebagai respon atas perubahan yang terjadi, keputusan Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina sebagai upaya meningkatkan pertahanan Jepang dan menghadapi tantangan isu keamanan baru di kawasan melalui penguatan kerjasama dengan Filipina. Menurut penulis, terdapat dua alasan yang mendorong Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina tahun 2013 yaitu pertimbangan akan adanya potensi ancaman Tiongkok dari segi politik dan ekonomi.

A. Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok dan Agresifitasnya di Kawasan Asia Pasifik

Perubahan iklim keamanan di Asia Pasifik sangat signifikan terasa pada tahun 2010-an. Perubahan ini mempengaruhi situasi politik dan keamanan negara-negara di kawasan Asia Pasifik hingga luar kawasan, bahkan sampai menjadi perhatian dunia internasional. Terjadinya pertikaian antara Jepang dan Tiongkok di Laut China Timur dan Laut China Selatan yang merupakan ancaman lebih besar terhadap stabilitas kawasan Asia Pasifik dibandingkan dengan konflik selat Taiwan. Tidak hanya itu, tensi antara Jepang dan Tiongkok meningkat seiring dengan meningkatnya kapabilitas militer Tiongkok. Agresifitas Tiongkok dalam ekspansi kekuatannya mengklaim sepenuhnya Laut China Timur dan Laut China Selatan. Agresifitas Tiongkok inilah yang akhirnya membuat Jepang mempertimbangkan adanya potensi ancaman dari Tiongkok atas kedaulatan Jepang dan stabilitas regional Asia Pasifik.

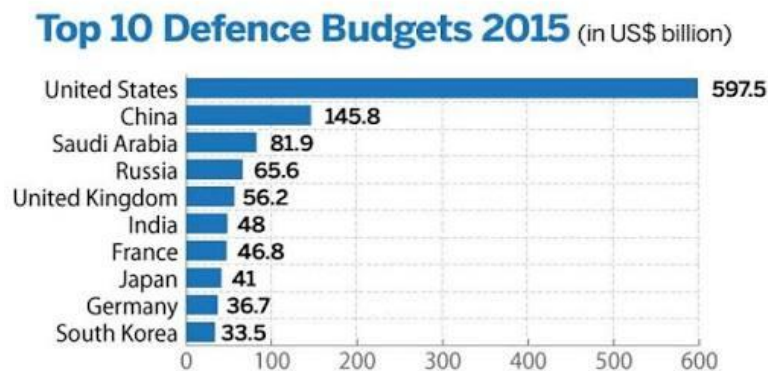
Jepang melihat bahwa kapasitas militer yang dimiliki Tiongkok saat ini dapat berpotensi menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan kedaulatan Jepang dan stabilitas kawasan Asia. Kekhawatiran Jepang semakin bertambah karena anggaran pertahanan Tiongkok yang terus bertambah seiring dengan meningkatnya perekonomian Tiongkok yang semakin membaik. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan bahwa Tiongkok akan dapat menjelma sebagai kekuatan baru dalam skala global dan regional.

a. Tiongkok dalam Politik Internasional

Seiring dengan meningkatnya perekonomian Tiongkok, pemerintah Tiongkok menaruh perhatian lebih terhadap sektor militernya. Konsentrasi tersebut diwujudkan dalam suatu kebijakan pertahanan Tiongkok untuk melindungi dan menjaga stabilitas kedaulatan Tiongkok beserta segala sumber ekonomi negara tersebut. Hal ini terlihat secara nyata bahwa anggaran belanja militer Tiongkok meningkat setiap tahunnya dengan jumlah yang fantastis. Pemerintah Tiongkok memberikan porsi yang besar untuk modernisasi postur militer Tiongkok. (Wirawan &

Subekti, 2012) Tentunya, peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok tersebut selaras dengan pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang ditandai dengan peningkatan GDP Tiongkok setiap tahunnya. Sebagai negara dengan perolehan GDP tertinggi kedua di dunia, suatu hal yang wajar bila Tiongkok menempatkan konsentrasinya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara melalui peningkatan anggaran belanja militer. (Jakarta Greater, 2014)

Gambar 4. 1 Sepuluh Besar Anggaran Pertahanan Negara Tahun 2015



Sumber: <http://www.gcmfg.com/defense-budget-capture-technical-resume-business/840/>

Diagram diatas menunjukkan pada tahun 2015 jumlah anggaran pertahanan Tiongkok sebesar \$145,8 milyar dan berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat. Besaran anggaran ini cukup fantastis walaupun nilai dua kali lipatnya pun belum dapat menyamai anggaran pertahanan milik Amerika Serikat. Dari diagram diatas juga terlihat bahwa jumlah anggaran Jepang sebesar \$41 milyar dan tidak lebih dari sepertiga jumlah anggaran pertahanan Tiongkok. Dengan demikian Tiongkok akan dapat mewujudkan keinginannya untuk melakukan revolusi secara komprehensif terhadap angkatan bersenjata Tiongkok sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ketua parlemen Tiongkok Le Keqiang dalam sebuah sidang parlemen tahunan. Selain itu pemerintah Tiongkok juga berkomitmen untuk melakukan modernisasi serta upaya meningkatkan kinerja serta kapabilitas kemampuan tempur pasukan bersenjata Tiongkok untuk menghadapi suatu ancaman. (Jakarta Greater, 2014)

Dalam Buku Putih Pertahanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok, perwujudan pembangunan pertahanan militer Tiongkok akan diselenggarakan secara berkelanjutan mengiringi pertumbuhan perekonomian Tiongkok secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Tiongkok mengawal pengeluaran belanja pertahanan agar terjaga dalam nilai yang berada dalam batas wajar dan terkendali agar dapat menjaga stabilitas politik serta perekonomian dalam negeri Tiongkok. Upaya peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dari tahun ke tahun diperuntukkan untuk memenuhi kelima tujuan utama militer Tiongkok yaitu terwujudnya keamanan rezim, integrasi teritorial, penyatuan nasional, keamanan maritime dan stabilitas regional. (Wirawan & Subekti, 2012)

Peningkatan kapasitas militer Tiongkok yang terjadi tiap tahun berhasil memosisikan diri sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Pasifik. Dapat diartikan pula bahwa

pada saat ini Tiongkok adalah negara terkuat di Asia. Terdapat kemungkinan yang cukup besar Tiongkok akan terus menambah kapasitas militernya hingga dapat mewujudkan ambisinya untuk menguasai dunia. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan yang terjadi pada anggaran pertahanan Tiongkok yang terus meningkat dalam kurun waktu 14 tahun terakhir sejak tahun 2000.

Berdasarkan diagram diatas, didapat informasi bahwa anggaran pertahanan Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping sejak tahun 2000 setiap tahunnya meningkat. Tercatat pada tahun 2014, anggaran militer Tiongkok mencapai angka tertinggi sebesar \$131,5 milyar dengan nilai prosentase sebesar 12,2% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (Jakarta Greater, 2014)

Pertumbuhan dan peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok yang terjadi setiap tahunnya menjadi pertimbangan bagi Jepang untuk merumuskan kebijakan keamanan Jepang. Hal itu disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan Jepang yang disahkan pada awal Agustus 2014 sebagai mekanisme pelaksanaan sistem pertahanan Jepang. Buku Putih Pertahanan Jepang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1970 dan sejak tahun 1976 Pemerintah Jepang secara berkala memperbaharui buku tersebut. Buku Putih setebal 500 halaman tersebut memuat empat cakupan pertahanan Jepang yang terdiri dari lingkungan Jepang, kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang, inisiatif pertahanan Jepang, serta pertahanan Jepang. Di dalam Buku Putih Pemerintah Jepang menyebutkan Tiongkok sebagai salah satu ancaman di Laut China Timur. Bahwa perkembangan militer Tiongkok yang baru-baru ini mengalami peningkatan dengan segala kecanggihan postur militer yang dimilikinya, dan agresifitas Tiongkok di Laut China Timur dan Laut China Selatan merupakan ancaman nyata bagi Jepang. Dengan demikian kebijakan pertahanan Jepang mengarah pada konflik Laut China Pasifik, melindungi kedaulatan yakni kepulauan Senkaku dan menitik beratkan perhatian kepada agresifitas militer Tiongkok di kawasan tersebut. Buku Putih tersebut memiliki efek penggetar atau *deterrence* untuk Tiongkok yang merupakan keuntungan tersendiri bagi Jepang. (Roza, 2014, p. 7)

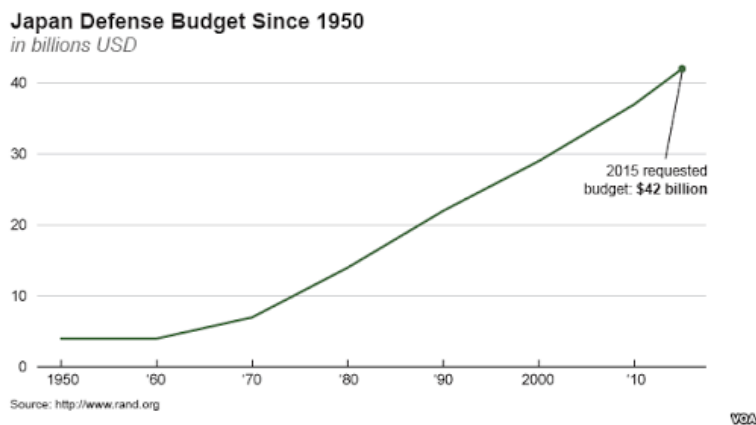
Melalui mekanisme pertahanan yang tertulis dalam Buku Putih, peran militer Jepang atau pasukan SDF diperluas jangkauannya tidak hanya di Laut China Timur. Perluasan jaringan tersebut dalam rangka menjalin kerjasama militer dengan negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Vietnam, Filipina, dan Australia yang notabene juga berkonflik dengan Tiongkok. Jepang berusaha menyamakan persepsi dengan negara-negara tersebut bahwa Tiongkok merupakan ancaman. Ketika Jepang dan negara yang berpotensi menjadi sekutunya memiliki pandangan yang sama bahwa peningkatan kapabilitas militer Tiongkok yang tidak transparan tersebut adalah ancaman, maka memungkinkan terciptanya kerjasama yang menguntungkan. Jika benar akan terjalin sebuah aliansi baru maka akan ada kerjasama yang lebih erat untuk menghadapi musuh bersama dalam bentuk pertukaran informasi intelejen, *collective self defense* seperti Jepang dan Amerika Serikat, serta dapat juga berupa kerjasama triangular atau trilateral. (Roza, 2014, p. 7)

Buku Putih Pertahanan Jepang juga memuat tentang keinginan Pemerintah Jepang untuk melakukan pemaknaan ulang atau reinterpretasi terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang yang menjadi landasan pasifisme militer Jepang selama ini. Dengan adanya amandemen Pasal 9 maka militer Jepang dapat aktif seperti militer yang dimiliki oleh negara normal. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang selama ini berlaku sebagai aliansi yang juga menjadi

payung militer Jepang. Aktifnya kembali militer Jepang secara otomatis akan berdampak pada *sharing budget* antara Jepang dan Amerika Serikat menjadi sepadan. Sebagai bagian dari strategi Jepang menghadapi ancaman Tiongkok di Laut China Selatan, Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina tahun 2012. Jepang yang lebih dulu terlibat dalam sengketa Laut China Selatan berupaya membantu Filipina sehubungan dengan melemahnya Amerika Serikat dalam sengketa Laut China Selatan dan Amerika Serikat berupaya membuat Jepang mandiri dalam hal militernya. (Roza, 2013, p. 3)

Jepang terus berupaya meningkatkan kapasitas militernya, hal ini dilakukan sebagai sebuah cara dalam menghadapi dan mengimbangi kekuatan militer Tiongkok. Setiap tahun Jepang menambah besaran anggaran pertahanan Jepang yang tentunya untuk meningkatkan mutu personil SDF dan persenjataan serta fasilitas militer termasuk logistik dan transportasi.

Gambar 4. 2 Anggaran Pertahanan Jepang Sejak tahun 1950-2015



Sumber: <http://www.voanews.com/a/japan-cabinet-approves-third-straight-defense-boost/2597568.html>

Berdasarkan gambar grafik diatas, anggaran pertahanan Jepang terus meningkat sejak tahun 1950. Anggaran pertahanan Jepang mencapai \$42 milyar pada tahun 2015 dan merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah pertahanan Jepang pasca Perang Dunia II berakhir. Dibawah komando Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, kenaikan anggaran pertahanan tahun 2015 sebesar 2% dari tahun sebelumnya ditujukan untuk menghadapi perubahan situasi keamanan di sekitar Jepang – termasuk potensi ancaman Tiongkok. Anggaran pertahanan Jepang yang baru dialokasikan untuk pembelian 20 pesawat patroli laut, 5 pesawat *crosscover*, 3 pesawat tanpa awak (*drone*), 6 pesawat siluman, dan rencana pembelian 30 unit amfibi.¹

Jepang khawatir terhadap kebangkitan kekuatan militer Tiongkok yang diprediksi akan menjadi raksasa militer Asia. Dengan melihat catatan sejarah selama ini, terdapat tiga kondisi yang memungkinkan Jepang menghadapi Tiongkok sebagai ancaman secara langsung. Pertama, jika pecah konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, maka Jepang dapat

¹ Muhammad Shamil dan Andika Hendra, *Jepang China Berlomba Perkuat Militer*, SindoNews, <https://nasional.sindonews.com/read/973848/149/jepang-china-berlomba-perkuat-militer-1425868836/13>, 9 Maret 2015

terlibat langsung dalam konflik tersebut karena dalam perkembangan cakupan aliansi Jepang dan Amerika Serikat dalam taraf *collective security*. Kedua, Jepang dapat terlibat dalam konflik langsung dengan Tiongkok yang timbul oleh adanya permasalahan teritorial klaim Pulau Senkaku serta perebutan sumber daya laut di perairan Laut China Timur. Ketiga, agresifitas militer Tiongkok di Laut China Selatan dan kepentingan nasional Tiongkok melalui klaim penuh atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan yang mengancam keamanan Jepang.²

Dalam suatu pernyataan, walaupun pemerintah Tiongkok berdalih bahwa peningkatan kapasitas dan anggaran militernya masih dalam taraf rendah jika dibandingkan dengan penduduk Tiongkok yang mencapai 1,3 milyar jiwa dan wilayah teritorial Tiongkok yang luas baik darat, udara, serta laut dengan garis pantai yang panjang. Namun hal ini tidak dapat mengurangi rasa kekhawatiran Jepang atas ancaman yang mungkin akan datang. Tidak ada jaminan bahwa Tiongkok dengan militer kuat tidak akan menyerang Jepang dan membahayakan keamanan Jepang, sehingga rasional bahwa Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina tahun 2013.

Tiongkok sebagai Ancaman di Laut Tiongkok Timur

Baik Jepang maupun Tiongkok saling mempertahankan klaim wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai bagian dari kedaulatan masing-masing negara. Sejak tahun 2012 persetujuan ini mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Pada September 2012, Jepang mengumumkan telah membeli kepulauan Senkaku seharga \$30 juta dari sebuah keluarga yang dianggap sebagai pemilik dari kepulauan tersebut. Jepang semakin mengukuhkan administrasi kepemilikan kepulauan Senkaku sebagai aset negara dan kedaulatan Jepang. Pembelian kepulauan Senkaku tersebut dianggap tidak sah oleh Tiongkok, Jepang dianggap mencuri wilayah kedaulatan Tiongkok. Situasi kian memanas, hingga baik Jepang maupun Tiongkok bersamaan memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan patroli perairan ketat di Laut China Timur hampir setiap minggu. Tensi tinggi antara pasukan militer kedua negara terjadi tidak hanya di wilayah perairan saja karena kapal-kapal milik Tiongkok hampir memasuki wilayah teritorial Jepang, namun juga terjadi di udara.³

Pada September 2012 Pemerintah Tiongkok mengirimkan kapal patroli di perairan Laut China Timur untuk mengukuhkan klaimnya. Sebanyak enam kapal pengintai dikirimkan Tiongkok ke wilayah perairan sekitar kepulauan Senkaku sebagai respon atas tindakan Jepang yang membeli pulau Senkaku. Patroli maritim dan pengiriman kapal pengintai ini dimaksudkan untuk mengintimidasi Jepang agar Jepang membatalkan pembelian tersebut.⁴ Posisi kepulauan Senkaku yang berada di jalur perdagangan sibuk diantara Taiwan dan Okinawa menambah nilai strategis kepulauan tak berpenghuni seluas 7km² tersebut. Posisi ini menambah nilai strategis yang dimiliki kepulauan Senkaku selain kandungan sumber energi minyak dan gas yang ada

² Wendy Andhika, *Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan?*, Jurnal Hubungan Internasional, Hal.3

³ Staf Forum, *Ketegangan di Laut China Timur*, Asia Pacific Defense Forum, 2015, Hal.48-51

⁴ Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2015, Hal.218

disana.⁵ Tiga dari total lima pulau yang ada di kepulauan Senkaku menjadi perebutan, yaitu Pulau Uotsuri, Pulau Minamikojima bawah, dan Pulau Kitakojima.⁶

Klaim wilayah oleh Tiongkok tidak hanya dilakukan di Laut China Timur yang menjadi ancaman langsung untuk Jepang. Tiongkok yang cenderung ekspansif juga ingin menguasai perairan Laut China Selatan yang memiliki nilai strategis di kawasan Asia Timur. Potensi ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan militer Tiongkok juga dirasakan Jepang menyangkut agresifitas dan klaim penuh Tiongkok atas Laut China Selatan.

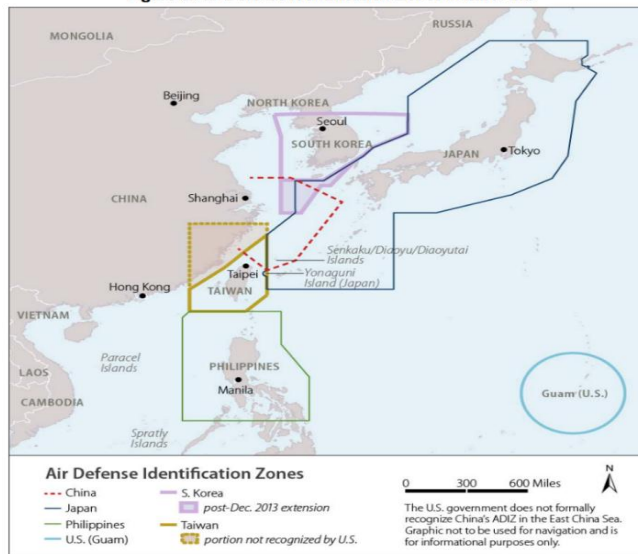
Dengan kapasitas militer yang semakin besar tiap tahunnya, kebijakan keamanan China cenderung ekspansif di kawasan. Hal ini terlihat dari ambisi China memperluas wilayah kekuasaannya di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Agresifitas China di kedua wilayah tersebut dipandang Jepang sebagai ancaman atas keamanan Jepang dan stabilitas kawasan Asia Timur. Konflik yang terjadi kian memanas setelah China mengumumkan memperluas jangkauan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) di atas perairan Laut China Timur pada Desember 2013. ADIZ merupakan mekanisme pertahanan udara yang berisi tentang batas-batas jangkauan kedaulatan udara suatu negara dimana di dalam ADIZ itu sendiri terdapat regulasi bagi pesawat terbang asing diwajibkan untuk mengidentifikasi dirinya dan memberikan informasi rencana serta tujuan dilakukannya penerbangan tersebut. Mekanisme ADIZ memberikan keharusan terhadap pesawat yang akan memasuki dan melewati zona tersebut dengan terlebih dahulu diminta memberikan identitas diri dan informasi tujuan penerbangan, serta tetap mempertahankan kontak radio dengan pihak local yang berwenang. Klaim ADIZ China tersebut menjadi ancaman cukup serius bagi Jepang karena skema ADIZ yang baru tersebut mencakup kepulauan Senkaku dan posisinya tersebut tumpang tindih dengan batas ADIZ milik Jepang yang telah ada sebelumnya. (Staf FORUM, 2015)

Gambar 4. 3 Air Defense Identification Zone di Laut China Timur

⁵ Rizki Roza, *Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diayu dan Stabilitas Kawasan*, Info Singkat Hubungan Internasional, 2012, hal.5

⁶ Staf Forum, *Ketegangan di Laut China Timur*, Asia Pacific Defense Forum, 2015, hal.49

Figure 2. Air Defense Identification Zones in East Asia



Sumber: Jurnal Congressional Research Service yang berjudul *China's Air Defense Identification Zone (ADIZ)* oleh Ian E. Rinehart dan Bart Elias tahun 2015

Berdasarkan gambar diatas, jangkauan ADIZ milik China (garis putus-putus warna merah) yang dirilis pada tahun 2013 menabrak batas ADIZ milik Jepang (garis lurus warna biru tua). Tumpang tindih antara ADIZ Jepang dan China ini akan berdampak serius terhadap stabilitas Laut China Timur. Perluasan cakupan ADIZ milik China meliputi kepulauan senkaku dan sebagian wilayah perairan di Laut China Timur. Dalam peta diatas juga memperlihatkan bahwa ADIZ China juga menabrak ADIZ milik Taiwan dan Korea Selatan. (Rinehart & Elias, 2015)

Fokus perhatian isu keamanan global yang berkembang pasca berakhirnya Perang Dingin mengarah kepada pencapaian terjaminnya keamanan energi masing-masing negara. Dewasa ini kebutuhan akan sumber daya energi bagi suatu negara merupakan kebutuhan dasar sebagai bagian dari kepentingan nasional yang harus dicapai. Hal ini juga yang terjadi di Laut China Selatan yang menjadi sengketa oleh negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Persengketaan Laut China Selatan telah mengganggu stabilitas keamanan Asia Timur, terlebih lagi China begitu agresif dalam klaim wilayah tersebut. Agresifitas China tersebutlah yang dipandang Jepang menjadi sebuah ancaman lain selain agresifitas China di Laut China Timur. Jepang merasa perlu menghentikan upaya China tersebut karena selain kepentingan nasional Jepang yang terganggu di Laut China Selatan, Jepang juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan bersama dengan Amerika Serikat yang menjadi negara aliansinya sejak Perang Dunia II berakhir.

klaim China terhadap wilayah Laut China Selatan merupakan klaim penuh dan terluas dibandingkan klaim negara lain. Dalam gambar di atas, klaim China seluas wilayah dan termasuk kepulauan yang berada di dalamnya berbentuk U (9 garis putus berwarna merah).

Klaim tersebut saling tumpang tindih dengan klaim Brunei Darussalam (garis berwarna putih), klaim Malaysia (garis putus-putus berwarna biru tua), dan klaim Filipina (garis putus-putus berwarna kuning). (Nankivell, 2016)

Table 4. 1 Penciptaan Lahan China di Kepulauan Spratly tahun 2015

Fitur	Daerah Buatan	Infrastruktur		
		Udara	Aset Tanah	Laut
Fiery Cross	0,96 km ²	Landasan Udara	Stasiun Utama	Pelabuhan
Subi	0,96 km ²	Landasan Helikopter/ Landasan Udara	Stasiun	-
Mischief	0,96 km ²	-	Stasiun	Pangkalan Angkatan Laut Masa Depan
Cuarteron	0,1 km ²	Landasan Helikopter X2	Komunikasi & Radar	-
Gaven	0,1 km ²	Landasan Helikopter X2	Anti-Udara	Platform Pasukan
Hughes	0,96 km ²	Landasan Helikopter Sudah Ada	Anti-Udara	Pelabuhan
Johnson South	75.000 m ²	Landasan Helikopter X2	Komunikasi & Radar	Pelabuhan Kecil

Sumber: <http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/>

Pada gambar di bawah juga semakin memperlihatkan bagaimana sepak terjang Pemerintah China dalam memperkuat klaimnya terhadap Laut China Selatan. Pada Mei 2015 kamera milik pesawat pengintai Amerika Serikat menangkap aktivitas kapal pengeruk milik China sedang beroperasi di dekat Mischief Reef di kepulauan Spratly.

b. Kepentingan Jepang di Laut China Selatan

Pada Januari 2013, Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario dan Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kelautan. Pemerintah Jepang akan terus membantu Filipina dalam penguatan kapasitas penjagaan wilayah pantai Filipina. Langkah tersebut dicapai melalui pengembangan sumber daya manusia dan penyediaan alat komunikasi serta pembelian kapal serbaguna. Saat situasi di wilayah strategis berubah maka pemerintah Jepang dan Filipina perlu meningkatkan kemitraan strategis dan

berbagai bentuk kerjasama. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik.⁷

Filipina memiliki tiga komponen utama geopolitik yakni potensi wilayah, energi dan kekuatan (*power*). Pertama, dari segi wilayah batasan-batasan wilayah Filipina yaitu, sebelah utara terdapat Taiwan, timur terbentang Samudera Pasifik, sebelah Selatan berdekatan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, sedangkan sebelah barat Filipina berhadapan dengan Laut China Selatan. Filipina lebih dekat dengan kepulauan Spratly.⁸ Kawasan sengketa ini berada sejauh 160 km dari daratan Filipina. Adapun wilayah Filipina diperkuat dengan Zona Ekonomi Eksklusif yang menyebutkan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sebagai bagian dari kedaulatannya dan 200 mil laut untuk *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE).⁹ Hal ini berdasarkan pada konvensi PBB dalam hukum *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang di adopsi tahun 1982.

Kedua, Filipina mendapatkan sumber energi tambahan dari kemenangan kasus Laut China Selatan melalui Mahkamah Permanen Arbitrase. Pengadilan tersebut memperjelas hak kedaulatan yang dimiliki Filipina untuk dapat mengakses minyak dan gas di lepas pantai Zona Ekonomi Eksklusif. Meskipun demikian, Filipina sendiri telah memiliki sumber utama gas alam yang berada di Malampaya.¹⁰

Ketiga, kekuatan militer Filipina memang tidak sekuat pasukan yang dimiliki Tiongkok. Namun militer Filipina yang berada di bawah payung pemerintahan Amerika Serikat mendapatkan bantuan keamanan. Filipina mendapatkan dana alokasi militer terbesar Amerika Serikat. Dana bantuan tersebut dimanfaatkan Filipina untuk membangun Angkatan Laut dan Udara dalam menjaga laut China Selatan.¹¹

Dari ketiga komponen yang dimiliki Filipina, Jepang berkeinginan untuk melakukan berbagai kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasama bertujuan menjaga pertahanan dan keamanan Negara di Laut China Selatan. Jepang juga memanfaatkan komponen geostrategi Filipina dalam membendung kekuatan Tiongkok.

Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina pada tahun 2013 sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional. Jepang memanfaatkan nilai geopolitik Filipina untuk membendung agresifitas militer Tiongkok di kawasan Laut China Selatan. Pemerintah Jepang pada tahun 2014 memperbaharui dan menerbitkan buku putih pertahanan Jepang yang di dalamnya memuat sejumlah persoalan yang berada di sekitar Jepang, seperti isu kedaulatan wilayah dan reunifikasi, serta peningkatan potensi-potensi masalah lainnya yang berkaitan

⁷ Yesi Syelvia, *Jepang Perkuat Kerjasama Kelautan dengan Filipina*, SindoNews, Januari, 2013, dalam <https://internasional.sindonews.com/read/705764/40/jepang-perkuat-kerjasama-kelautan-dengan-filipina-1357809785> diakses pada 5 Desember 2017

⁸ *Ibid.*

⁹ *Text Convention on the Law of The Sea UNCLOS* hal. 38-40

¹⁰ *Cina-Filipina Kelola Sumber Energi di Laut Cina Selatan* dalam <https://m.tempo.co/read/news/2017/07/26/118894696/cina-filipina-kelola-sumber-energi-di-lau-cina-selatan>, diakses pada 1 Agustus 2017

¹¹ Koran Kompas Internasional, *Filipina di Atas Angin*, 26 November 2015

dengan wilayah, kedaulatan, ataupun kepentingan ekonomi maritim. Buku Putih Jepang menjelaskan mengenai agresifitas militer Tiongkok sebagai sumber ancaman.

B. KESIMPULAN

Keputusan Jepang untuk menjalin sebuah kerjasama dengan Filipina tahun 2013, tidak terlepas dari ketertarikan Jepang dalam memulai kembali hubungan kerjasama terutama di bidang keamanan dengan Filipina yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sejarah singkat awal lahirnya hubungan antara Jepang dan Filipina yang diawali oleh masa kependudukan Jepang di negara Filipina. Pendudukan Jepang di Filipina tidak hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusianya, Jepang juga menciptakan tatanan baru di bagi rakyat Filipina. Hingga mundurnya pasukan perang Jepang dari kawasan Filipina menjadi akhir masa kependudukan Jepang di Filipina yang disebabkan hancurnya pusat Kota-Kota besar di Jepang dan menjadi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Selanjutnya Jepang menandatangani perjanjian damai *San Fransisco Treaty* dan perjanjian kerjasama *Japan-US Security Treaty* pada tahun 1951.

Pelecutan senjata yang dialami Jepang selama ini menyebabkan Jepang tidak memiliki sistem pertahanannya sendiri dan seluruh keperluan keamanan negara Jepang berada di bawah payung Amerika Serikat. Hal ini membuat Jepang tidak dapat terlibat langsung dalam isu-isu militer baik kawasan regional maupun internasional. Namun berbagai isu keamanan yang mulai berkembang dalam dunia internasional menyebabkan perubahan pada peta politik internasional Jepang dan negara-negara sekitarnya.

Kawasan Laut China Selatan merupakan perairan yang telah menjadi primadona bagi setiap negara yang berada di sekitar perairan tersebut. Kawasan perairan yang dianggap memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat besar menciptakan persaingan untuk dapat menjadikan bagian pulau, karang-karang maupun wilayah perairan di Laut China Selatan menjadi bagian dari negaranya, agar dapat di kelola dan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung. Persaingan ini menyebabkan suasana ketegangan bagi sesama negara kawasan Asia Pasifik. Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan dan Tiongkok adalah negara-negara yang terlibat dalam persaingan perebutan wilayah Laut China Selatan.

Isu yang terus berkembang terkait sengketa Laut China Selatan yang kian memanas membuat kepentingan Jepang sedikit terganggu, sehingga Jepang mencoba memulai kembali hubungan kerjasama keamanan dengan negara-negara bekas jajahannya, salah satunya Filipina. Jepang yang terus mencoba menaikkan anggaran belanja bagi militernya dan kemandirian sistem pertahanan ditandai dengan turut melakukan kerjasama terkait bantuan militer ke Filipina.

Dalam pengkajian permasalahan yang diteliti oleh penulis, penulis menemukan fakta yang menjadi alasan atau latar belakang Jepang menjalin kerjasama dengan Filipina tahun 2013. Bahwasanya keputusan Jepang menjalin kerjasama dengan melihat geopolitik disertai geostrateginya Jepang di kawasan Laut China Selatan sehingga Jepang memilih untuk melakukan kerjasama terutama di bidang militer dengan Filipina. Pengutan pertahanan dilakukan dengan

beberapa cara yang telah disepakati, seperti latihan gabungan militer dan pemberian alusista seperti kapal-kapal perang. Keputusan Jepang kerjasama dengan Filipina dengan mempertimbangkan peningkatan sengketa Laut China Selatan, dan lemahnya sistem pertahanan Filipina. Menurut penulis, yang menjadi alasan terdorongnya Jepang menjalin kerjasama dengan Filipina tahun 2013 yaitu pertimbangan akan adanya potensi ancaman dari Tiongkok. Potensi ancaman yang datang dari Tiongkok berupa peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dan agresifitasnya di kawasan Asia Pasifik.

Bahwa pada tahun 2013 agresifitas China terlihat saat China melakukan klaim terhadap kepulauan Senkaku dan mempublikasikan perluasan *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* di Laut China Timur meliputi wilayah kepulauan Senkaku yang menjadi sengketa oleh Jepang dan China. Kekuatan militer China yang cenderung ekspansif yang mana pada tahun 2014, China menyatakan klaim penuh atas Laut China Selatan dan melakukan penciptaan lahan di tujuh fitur yang ada di kawasan kepulauan Spratly yakni Fiery Cross, Subi, Mischief, Cuarteron, Gaven, Hughes, dan Johnson South. Kemudian, pertimbangan adanya potensi ancaman dari kepemilikan Nuklir Korea Utara menjadi alasan Jepang menyepakati revisi tersebut. Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara menjadi ancaman bagi wilayah teritorial Jepang dan stabilitas kawasan Asia Timur.

C. DAFTAR PUSTAKA

Ashari Kh. (2015). Kamus Hubungan Internasional (1st ed.). Bandung: Nuansa Cendekia.

Brian Hocking and Michael Smith. (1995). *World Politics: An Introduction to International Relation*, New York: Routledge.

Budiarjo, Mariam, Prof. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Dougherty, James, E., Jr, Robert, L, Pfaltzgraff. (2014) *Teori - Teori Hubungan Internasioanal: Sebuah Survai Komprehensif*, Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hill, C., & Menzel, J. (2008). *Contitutionalism in Southeast Asia*, Singapore, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008.

Holsti, K, J. (1988). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisi*, Edisi Keempat Jilid Kedua, Jakarta: Erlangga.

Plano, Jack, Olton, Roy. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Putra Abardin CV.

Tsuciyama, Jitsuo. (2000). *Ironies in Japanese Defense and Disarmament Policy Japanese Foreign Policy Today*. New York: Palgrave.

Wirawan, Hariyadi, Rayyan Subekti, Akbar. (2012). *Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Implikasi terhadap Keamanan Nasional Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Andhika, W. (2013, April). Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan? *Jurnal Hubungan Internasional*, 2. Retrieved Maret 30, 2017

E. Rinehart, Ian, dan Elias, Bart. (2015). *China Air Defense Identification Zone (ADIZ)*. Congressional Research Servics.

Lisbet. (2012). *Peningkatan Kekuatan Militer China*. Info Singkat Hubungan Internasional.

Lynn S. Nonkivell, Kerry. 2015. *Asia Suatu Restroketif Maritim Asia Pasific*. Defense Forum.

Roza, Rizki. 2016. *Indonesia di tengah Peningkatan Ketegangan di Laut China Selatan*. Info Singkat Hubungan Internasional.

Roza, Rizki. 2012. *Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diayudan Stabilitas Kawasan*. Info Singkat Hubungan Internasional.

Roza, Rizki. 2014. *Buku Putih Pertahanan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Sengketa Laut China Timur*. Info Singkat Hubungan Internasional.

Satris, Rezki. 2015. *Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik*. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Staf FORUM. 2015. *Ketegangan di Laut China Timur*. Asia Pasific Defense FORUM.

